

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ilyas, Wiryawan dan Burton, Richard, 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, Hanitjo Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Komariah, Rukiah dan Purwito, Ali, 2006, *Pengadilan Pajak (Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean, dan Cukai)*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nugraha, Safri, 2005, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, "*Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*", Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Syofyan, Syofrin dan Hidayat, Asyhar, 2004, "*Hukum Pajak dan Permasalahannya*", Bandung : Refika Aditama.
- H.R, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Mahfud MD, Moh., 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : Penerbit Renaka Cipta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Sugiharti, Dewi Kania, SH.,MH, 2005, *Perkembangan Peradilan Pajak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Buana, Hadi, 2012, *Peradilan Pajak Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia*, Jakarta : IND HILL CO.
- Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Nusantara, Abdul Hakim dan Yasabari, Nasroen, 1980, *Pembangunan Hukum: Sebuah Orientasi (Pengantar Editor) dalam Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 1998, *Pengantar Ilmu hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Asmara, Galang, 2006, *Peradilan Pajak Dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

### **Makalah dan Artikel**

Abroni Nasution, mewakili Dirjen Pajak, “Peradilan Pajak Indonesia”, Makalah disampaikan Diskusi Panyang diseleggarakan oleh Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter (PPFM), Jakarta, tanggal 13 Desember 1993. Dalam Majalah *Kajian Fiskal dan Moneter*, No 14/X/1994, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, Oktober 1994.

Syofrin Syofyan, BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak (BPP) Merupakan Peradilan Administrasi Murni”, artikel dalam *Jurnal Perpajakan Indonesia (JPI)*, Vol. 2, No. 5, Desember 2002, Jakarta.

Muchsin, Reformasi Pengadilan Pajak, artikel dalam *Jurnal Varia Peradilan* No.294, Mei 2010, Jakarta.

### **Undang – undang**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157)

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Pajak*.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27)

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 85)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129)

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

#### Sumber Lain

MaPPI FHUI, 2014, dalam artikel *Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak*,  
<<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom>> (Diakses pada 11 April 2014)

Hukum Online, 2014, dalam artikel *Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak* Belum Berjalan  
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>, (Diakses 13 April 2015)

Sekretariat Pengadilan Pajak, 2014, *Visi dan Misi Pengadilan Pajak*,  
<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/profile.asp>, (Diakses tanggal 27 Januari 2016)